

KPU Jakarta Pastikan Hak Petugas KPPS yang Meninggal Terpenuhi

JAKARTA (IM) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI memastikan hak anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang meninggal dunia, terpenuhi sesuai peraturan pada penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Kami sudah minta KPU tingkat kota untuk diproses sesuai aturan yang ada," kata Ketua KPU Provinsi DKI, Wahyu Dinata dikutip pada Jumat (16/2).

Wahyu menjelaskan, pihaknya terus memprioritaskan komunikasi dengan pihak keluarga mengenai hak-hak yang bersangkutan.

Dia meminta KPU tingkat kota mampu menjamin kesehatan para anggota KPPS yang sakit maupun meninggal dunia untuk mendapatkan hak maupun bantuan. "Ada bantuan dari KPU tingkat kota," tambahnya.

Namun, Wahyu tak merinci apa saja yang akan diterima hak anggota KPPS yang wafat sesuai aturan Pemilu 2024.

Hingga kini, tercatat sebanyak dua orang anggota KPPS meninggal dunia di Jakarta akibat kelelahan dan mengalami kecelakaan.

Pertama, Ketua KPPS Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 70

Kelurahan Rawa Badak Utara, Iyos Rusli meninggal dunia saat menjalankan tugas melakukan penghitungan suara pada Rabu (14/2) malam.

Kedua, seorang petugas KPPS meninggal dunia inisial AJ (24) setelah mengalami kecelakaan tunggal di Jakarta Pusat, saat hendak mengantarkan logistik dari Kelurahan Kebon Kacang ke Gelanggang Olahraga (GOR) Tanah Abang.

Data KPU RI menyebutkan, sebanyak 894 petugas KPPS Pemilu 2019 meninggal dunia dan 5.175 orang mengalami sakit.

Sementara, KPU DKI mencatat sebanyak 31 petugas KPPS yang ada di Jakarta meninggal dunia pada Pemilu 2019 dan karenanya diharapkan KPU terus melakukan evaluasi.

Sebelumnya, Anggota KPU RI, Mochammad Afifuddin berharap jumlah anggota KPPS yang meninggal dunia akibat kelelahan tak bertambah.

Menurutnya, KPU sudah melakukan segala upaya untuk memitigasi hal tersebut mulai dari tes kesehatan, pembatasan usia hingga kerja sama dengan daerah dalam memenuhi sejumlah hak mereka seperti santunan dan lainnya jika terjadi risiko. ● yan

Heru Budi Resmikan Tempat Pengolah Sampah Jadi Bahan Bakar

JAKARTA (IM) - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono meresmikan tempat pengolahan sampah reduce-reuse-recycle (TPS3R) di Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (16/2). Tempat tersebut adalah fasilitas pengolahan sampah rumah tangga menjadi bahan bakar alternatif.

"TPS3R level atau tingkat kelurahan ini bisa memproses sampah sebanyak 50 ton per hari. Jadi sekitar Kelurahan Pejaten Barat 50 ton sampahnya bisa diolah menjadi bahan bakar alternatif. Konsep seperti RFD kecil," ujar Heru Budi.

Hasil pengolahan sampah di TPS3R, kata Heru, sama dengan refuse derived fuel (RDF) plant di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi. Nantinya, bahan bakar alternatif yang di-

hasilkan juga akan dijual ke industri manufaktur semen, bersamaan dengan hasil olahan di RDF plant Bantargebang.

"Ini sama dengan kemarin yang di Cililitan, dijual bersamaan dengan hasil dari Bantargebang. Di sini setelah dikeringkan, lalu dibeli oleh off-taker yang sudah bekerja sama dengan Pemda DKI," kata Heru Budi.

Heru menegaskan, keberadaan TPS3R adalah upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi masalah sampah di Ibu Kota. Dia menargetkan setiap kecamatan di Ibu Kota memiliki TPS3R untuk mengelola sendiri sampah di wilayahnya. "Semoga apa yang dijalankan, dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup bermanfaat bagi masyarakat, untuk mengurangi sampah di tempatnya," tutur Heru Budi. ● yan

Pemkot Depok Optimistis Bisa Meraih 13 Kali WTP

DEPOK (IM) - Wali Kota Depok, Mohammad Idris optimistis bisa meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 13 kali berturut-turut di tahun 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Harus optimistis bisa WTP 13 kali berturut-turut, karena penilaian ini kan sustainable atau berkelanjutan. Ini bukti keseriusan dan komitmen kita untuk penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel," kata Mohammad Idris di Depok, Jumat (16/2).

Untuk tahap awal katanya diadakan Entry Meeting Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2023 pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat (Jabar).

Idris mengatakan pemeriksaan ini sangat bermanfaat untuk melengkapi LKPD Kota Depok TA 2023, dengan kesiapan yang lebih matang.

Menurut Idris kegiatan ini untuk melihat bagaimana pengelolaan anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk TA 2023. Utamanya dari sisi laporan keuangan sebagai sebuah pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Pemeriksaan pendahuluan ini, lanjutnya sangat bermanfaat untuk melihat kekurangan, dan kelemahan itu di luar persoalan, fraud atau penyimpangan. Penilaian akan dilaksanakan selama satu bulan, terhitung 15 Februari-15 Maret 2024.

Idris berpesan kepada seluruh Perangkat Daerah agar siap dalam pengumpulan dan pelaporan data. Unsur kehati-hatian harus diperhatikan, agar dapat menyajikan data yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut dia kami sudah siap penilaian. Ada juga beberapa Perangkat Daerah yang harus mempersiapkan data lebih matang lagi. Nanti, dalam pelaksanaannya bisa secara komunikatif dengan para pemeriksa. ● yan

4 | Metropolis

FOTO: ANT



PERESMIAN TPS 3R SIAGA DI JAKARTA

PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (kedua kiri) bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Asep Kuswanto (kiri) meninjau proses pengolahan sampah menjadi bahan bakar RDF di TPS 3R Siaga, Jakarta, Jumat (16/2). Pemrov DKI melalui DLH membangun Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, dan Recycle (TPS 3R) untuk memaksimalkan pengolahan sampah menjadi bahan bakar Refuse Derived Fuel (RDF).

Normalisasi Kali Ciliwung Tetap Dilanjutkan Secara Bertahap

Heru menyebut ada beberapa konsep untuk penanggulangan banjir di Jakarta, salah satunya membangun embung (waduk kecil). Embung Jagakarsa di Jakarta Selatan menjadi salah satu upaya untuk mengatasi genangan dan pengendalian banjir. Area embung Jagakarsa seluas sekitar 8.000 meter persegi ini dapat menampung 17.000 kubik air.

JAKARTA (IM) - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan normalisasi Kali Ciliwung untuk mengatasi persoalan banjir di Jakarta akan tetap dilanjutkan secara bertahap.

"Begini, ada titik-titik tertentu yang bisa kita selesaikan, ada yang memang secara bertahap. Tidak semua Kali

Ciliwung sekian puluh kilometer itu kita selesaikan, ada dampak sosial yang perlu diperhitungkan," kata Heru se usai tebar benih ikan dan tanam pohon di embung Jagakarsa, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (16/2).

Heru menyebut ada beberapa konsep untuk penanggulangan banjir di Jakarta, salah satunya membangun

embung (waduk kecil). Embung Jagakarsa di Jakarta Selatan menjadi salah satu upaya untuk mengatasi genangan dan pengendalian banjir.

Adapun area embung Jagakarsa mempunyai luas sekitar 8.000 meter persegi yang dapat menampung 17.000 kubik air.

Embung didesain sebagai parkir air atau kolam retensi untuk mengatasi genangan dan pengendalian banjir atau genangan di wilayah Kelurahan Lenteng Agung dan sekitarnya serta untuk mengatur debit air Kali Mampang yang menyambung ke Kali Krukut.

Embung atau waduk skala kecil tersebut diharapkan dapat bermanfaat, terutama untuk mencegah genangan saat curah hujan tinggi di Jakarta Selatan.

"Titik-titik seperti Rawajati, Cawang, Jakarta Timur bisa diselesaikan, yang lain

sedang berjalan. Sambil menunggu waktu, kita secara cepat membangun embung. Saya terima kasih kepada rekan-rekan Kadin DKI yang selalu berpartisipasi untuk warga Jakarta," ucap Heru. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi dan sejumlah menteri terkait, meninjau perkembangan proyek normalisasi

Kali Ciliwung di Pengadegan, Jakarta Selatan, Selasa.

"Ini normalisasi Kali Ciliwung kira-kira tinggal 17 kilometer, setelah berhenti beberapa lama akan kita mulai," kata Jokowi se usai peninjauan di Jakarta, Selasa (21/2/2023) lalu.

Jokowi berharap normalisasi Kali Ciliwung yang tersisa 17 kilometer akan selesai pada akhir 2024. ● yan

Namanya Disebut dalam Film "Dirty Vote", Heru Budi: Enggak Apa-apa, Terima Kasih...

JAKARTA (IM) - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono tidak mempersoalkan tiga pakar hukum dalam film dokumenter Dirty Vote yang mengaitkan nama dirinya dengan dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Film yang disutradarai Dhandy Laksono itu menyebut penunjukan Pj Gubernur di berbagai daerah oleh Presiden Joko Widodo merupakan upaya mengamankan suara untuk kandidat tertentu pada Pemilu 2024.

"Ya enggak apa-apa (disebut), terima kasih," singkat Heru Budi kepada wartawan di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (16/2).

Heru tak berkomentar lebih jauh soal film dokumenter Dirty Vote, ataupun dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang melibatkan dia dan para Pj kepala daerah lainnya. Dia hanya tersenyum dan lanjut berjalan menuju mobil bersama para pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sebagai informasi, film Dirty Vote ditayangkan perdana melalui kanal rumah produksi WatchDoc di You-

Tube pada Minggu (11/2) pukul 11.00 WIB, bertepatan hari pertama masa tenang pemilu. Dalam film Dirty Vote, tiga pakar hukum tata negara, yakni Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar, bergantian menjelaskan dugaan kecurangan pada Pemilu 2024.

Saat memaparkan dugaan kecurangan pada Pemilu 2024, Feri menjelaskan bahwa penjabat gubernur yang dipilih masih memiliki relasi dengan presiden. "Berbagai hal bisa kita lihat antara relasi penunjukan dan berbagai peristiwa ketidaknetralan penjabat gubernur di dalam pemilu," ungkap Feri.

Nama Heru Budi yang ditunjuk sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta pun disebutkan terkait dengan dugaan kecurangan tersebut. Sebab, Heru Budi saat ini masih menjabat sebagai Kepala Sekretariat Kepresidenan (Kasetpres).

Selain Heru Budi, disebut pula nama Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmud, yang saat ini juga menjabat sebagai Deputi Bidang Sekretariat Kepresidenan. yan

Heru Budi Hartono Pastikan Pasokan Beras untuk Warga Jakarta Aman

JAKARTA (IM) - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono memastikan harga beras di Jakarta akan stabil dan stok beras terjaga.

"Kemarin bersama bapak Presiden sudah memastikan Bulog dan seluruh jajaran terkait bisa menstabilkan stok yg ada di Jakarta," ujarnya kepada awak media, Jumat (16/2).

Heru menegaskan pasca kunjungan Presiden ke pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur beberapa waktu lalu, beras akan segera didistribusikan.

"Kemarin bapak presiden juga sudah melihat stok itu ada dan langsung didistribusikan," tegas Heru.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan turun langsung meninjau ke

Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) untuk memastikan ketersediaan stok perberasan nasional pada Kamis (15/2).

Terkait jumlah harga beras yang melonjak, Jokowi menegaskan, kenaikan tidak dipengaruhi oleh gelontoran bantuan pangan beras alias bansos ke masyarakat.

Dia menilai, bantuan pangan beras justru bertujuan untuk bisa mengendalikan harga beras dengan memasok kebutuhan masyarakat.

"Tidak ada hubungannya sama sekali dengan bantuan pangan beras, karena justru ini yang bisa mengendalikan, karena suplainya lewat bantuan tersebut ke masyarakat. Justru itu menahan harga agar tidak naik, kalau tidak, justru melompat. Ini hukum supply demand," kata Jokowi. ● yan



POSKO PINTU AIR AMBLAS KE ALIRAN KALI GROGOL

Pekerja dari Dinas Kebersihan DKI Jakarta membersihkan puing bangunan amblas di kawasan pintu air Palmerah, Jakarta, Jumat (16/2). Bangunan Posko pantau debit air petugas kebersihan Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air, amblas saat hujan deras mengguyur kawasan tersebut.

FOTO: ANTARA

PENGUMUMAN

bahwa berdasarkan akta tanggal 7/2/2024, Nomor 2, yang dibuat dihadapan Ir. Sari Wahjuni, M.Sc., S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kota Bandung, telah ditandatangani akta perubahan Perseroan Komanditer CV. SINAR MAS SAKTI, berkedudukan di Kota Bandung. Bahwa segala Utang-Piutang dan kewajiban Perseroan terhitung mulai tanggal ikian ini telah menjadi tanggung jawab Likuidator Perseroan yaitu Tuan PANJI MECACH CH. Dan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan Perseroan dapat menghubungi Likuidator Perseroan dengan alamat, jalan HZ. Mustafa No. 29, RT 002, RW 010, Kelurahan Tegurjaya, Kecamatan Chiduged, Tasikmalaya.

Notaris di Kota Bandung

Ir. Sari Wahjuni, M.Sc., S.H., M.H., M.Kn.